



## Anggaran perjalanan dinas akan ditekan

Rina Wijayanti  
HARIAN JOGJA

**JOGJA**—Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/2011 tentang Standar Biaya 2012, anggaran perjalanan dinas di Kota Jogja juga akan ditekan.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Arbakh Yoga Widodo mengaku pihaknya tengah menyusun anggaran tersebut. Dia menjelaskan berdasarkan peraturan tersebut maka sistem kontrol dalam penganggaran perjalanan dinas bisa lebih mudah dilakukan. Peralihan, kata Arbakh dengan sistem tersebut pengeluaran perjalanan dinas bisa dilakukan dengan satu pintu.

"Nantinya pada anggaran 2012 anggaran perjalanan dinas akan dimasukkan dalam pos sekretariat dan hanya dalam satu pintu itu saja. Mekanisme ini berbeda pada tahun 2011, pada tahun 2011 anggaran perjalanan dinas disisipkan pada jenis kegiatan sehingga memang agak sulit dilakukan kontrol," tandasnya Selasa (13/12).

Arbakh menambahkan dengan sistem anggaran berbasis kinerja ini, maka nantinya kunjungan yang bersifat konsultatif

### Anggaran perjalanan dinas Pemkot Jogja 2012

- Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  
Rp422,8 juta
- Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Rp500,5 juta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Rp191,8 juta
- Dinas Perhubungan  
Rp200 juta
- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian  
Rp1,45 miliar
- Bagian Hukum  
Rp234,4 juta

SUMBER PEMKOT JOGJA

akan lebih diefektifkan. Efektivitas perjalanan dinas konsultatif itu di antaranya dengan melakukan beberapa konsultasi sekaligus dalam satu tujuan.

Sebagai upaya nyata penekanan anggaran perjalanan dinas, DPDPK memberikan data perdin beberapa SKPD di Kota Jogja. Menurut Arbakh, besaran anggaran perjalanan dinas itu disesuaikan dengan kinerja dan keperluan SKPD.

Dikonfirmasi, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti mengaku perjalanan dinas mendaatkan keuntungan finansial. Dia menjelaskan, setiap kali dilakukan perjalanan dinas rata rata mendapatkan uang representasi sebesar Rp400.000 perhari. Padahal biasanya, se-

tiap menempuh perjalanan dinas setidaknya dilakukan dalam tiga hari kerja.

"Seingat saya jika ada perjalanan dinas representasi dalam tiga hari ke Jakarta mendapatkan Rp1,2 juta atau Rp400.000 setiap hari. Itu belum termasuk jika ada sisa biaya penginapan, karena kalau tiket perjalanan sudah sesuai harga," terangnya.

Wakil rakyat, menurutnya memiliki beberapa pos untuk perjalanan dinas. Di antaranya pos kegiatan bimbingan teknis, pos advokasi, pos kunjungan kerja, dan pos pendampingan. Khusus pos kunjungan kerja terutama panitia khusus bisa dilakukan berulang kali tergantung program legislasi daerah (prolegda).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 09 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005